**KEDUDUKAN ULAMA DAN ULEEBALANG
SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH (1900-1946)**

KEDUDUKAN ULAMA DAN ULEEBALANG SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH (1900-1946) | MUHAMMADDAR

MUHAMMADDAR

**KEDUDUKAN ULAMA DAN
DAN ULEEBALANG**
— **SEBAGAI** —
ELIT SOSIAL
POLITIK ACEH (1900-1946)

**KEDUDUKAN ULAMA DAN *ULEEBALANG*
SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH
(1900-1946)**

MUHAMMADDAR

pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

**KEDUDUKAN ULAMA DAN *ULEEBALANG*
SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH
(1900-1946)**

Penulis:
Muhammaddar

ISBN: 978-623-315-979-1

Editor:
Tri Hidayati

Design Cover:
Arsyie Kania Rakhma

Layout:
Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:
Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah
Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved
Cetakan pertama: 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“KEDUDUKAN ULAMA DAN ULEEBALANG SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH (1900-1946)”** Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas tentang kedudukan Ulama dan Uleebalang dalam struktur masyarakat Aceh, Bagaimana kedudukan Ulama dan Uleebalang pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dan Mengapa terjadinya pergeseran status sosial Ulama dan Uleebalang dalam Struktur Masyarakat Aceh. Dan hasilnya terdapat beberapa hal yang membuat pergeseran status mereka ini terus saja mengalami grafik pasang surut. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain: Agama, ekonomi, politik, sosiologis, dan psikologis. Semuanya ini merupakan faktor penyebab timbulnya pergeseran terhadap kedua elit ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam disertasi ini masih terdapat kekurangan ataupun kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan disertasi ini. Penulis berharap, buku ini dapat memberikan motivasi untuk para pembaca guna untuk lebih memahami tentang kedudukan ulama di Aceh.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEDUDUKAN DAN PENGARUH ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH.....	5
A. Pengertian Ulama.....	5
B. Kedudukan Ulama sebagai anggota Masyarakat.....	8
C. Ulama Sebagai <i>Qadhi</i> (Ketua Pengadilan Agama).....	14
D. Ulama Sebagai Kepala Agama (Syaiikhul Islam)	18
E. Ulama Sebagai Pemimpin Lasykar Jihad.....	23
BAB III KEDUDUKAN DAN PENGARUH <i>ULEEBALANG</i> DALAM MASYARAKAT ACEH	35
A. Pengertian <i>Uleebalang</i>	35
B. Kedudukan <i>Uleebalang</i> Sebagai Anggota Masyarakat .	39
C. <i>Uleebalang</i> Sebagai Kepala Adat.....	45
D. <i>Uleebalang</i> Sebagai Panglima Laot	52
E. <i>Uleebalang</i> Sebagai Peutua Seunebok.....	58
BAB IV ULAMA DAN <i>ULEEBALANG</i> SEBAGAI ELIT SOSIAL	63
A. Ulama dan <i>Uleebalang</i> Pada Zaman Penjajahan Belanda	63
B. Ulama dan <i>Uleebalang</i> Pada Zaman Penjajahan Jepang	78
C. Pergeseran Status Sosial Ulama dan <i>Uleebalang</i>	92
BAB V PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

Aceh yang terletak di ujung Sumatera adalah bagian paling utara dan paling barat dari kepulauan Indonesia. Di sebelah baratnya terbentang Lautan Hindia, sementara di sebelah utara dan timurnya terletak Selat Malaka. Sejak zaman kuno Selat Malaka merupakan jalur perniagaan yang ramai dan banyak dilalui kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Tempat-tempat disepanjang perairan Selat Malaka, silih berganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil pembekalan bagi kapal-kapal yang lewat di sana. Salah satu yang terkenal ialah Malaka.¹ Selain itu Malaka (abad ke-15) juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh para Pedagang baik yang berasal dari Timur Tengah maupun dari Gujarat (India).

Setelah Malaka mengalami kemunduran sekitar tahun 1511 M, akibat penjajahan Portugis, didukung juga oleh kemunduran kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 yang ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1360 M.² Kerajaan Aceh Darussalam muncul dan berdiri dengan kuat serta megahnya, dan berhasil menghalau Portugis di Perairan Selat Malaka pada tahun 1629 M pada masa Pemerintah Iskandar Muda.³ Kemenangan itu juga turut mendorong percepatan Kerajaan Aceh menjadi satu-satunya kerajaan di Sumatera yang mencapai kedudukan tinggi. Pada permulaan abad ke-16 M. Ali Mughayat Syah juga telah mempersatukan daerah-daerah kecil menjadi suatu Negara Islam yang kuat, sedangkan pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) Kerajaan Aceh telah mencapai puncak kejayaan yang sangat maju dalam berbagai bidang, bahkan telah

¹ Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan imperialisme* (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008), h.7

² [http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan Aceh](http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh), h. 1

³ [http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan Aceh](http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh), h. 1

menguasai sebagian Sumatera, daerah Bengkulu, Pariaman, dan sungai Indragiri serta Kerajaan Keudah, Perak, Pahang dan Terengganu di Semenanjung Malaya.⁴ Kerajaan yang bertahta di ujung Pulau Sumatera dimaksud telah membentuk sejarah dan budayanya dengan nilai-nilai Islam.

Pada gilirannya, dalam konfigurasi sosio kultural masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan Islam dan heroisme. Bagi masyarakat Aceh, Islam tidak hanya bermakna sebagai kepercayaan agama saja, melainkan juga sebagai identitas pribadi yang dijunjung tinggi dan disucikan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa hampir tidak ada masyarakat Aceh (yang asli) yang tidak beragama Islam.⁵ Oleh karenanya Islam menjadi bagian dari harga diri yang patut dibela dan dipertahankan sekuat tenaga. Selaras dengan itu pula, secara *ipso facto*, mereka merupakan pemeluk agama Islam yang fanatik, sementara *heroisme* adalah semangat (*spirit*) yang selalu melekat dalam diri mereka yang dihembus dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu *heroisme* dalam Islam bagaikan dua sisi mata uang (*two sides of coins*) yang menyatu dan melekat dalam eksistensi individual maupun sosial masyarakat Aceh.

Dari sudut lain, Khazanah lama masyarakat Aceh menampilkan pula *adat* dan *agama* sebagai dua unsur yang dominan, yang telah mengendalikan gerak hidup rakyat yang berada di ujung utara pulau Sumatera. Di satu pihak, Sultan dan *Uleebalang*⁶ merupakan dua pilar utama yang mendukung

⁴ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press, 1992), h.14.

⁵ Yusni Saby, *A Profite on the Ulama in Acheneese Socicty*, Jurnal Al-Jami'ah, 28, (2000), h.280.

⁶ *Uleebalang* adalah berasal dari kata hulubalang dalam kerajaan Melayu, yang artinya kepala distrik atau Kepala Laskar (batalyon). Tugasnya sebagai pembantu Sultan di Kerajaan (*Uleebalang Poteu*) dan pembantu sultan di daerah-daerah yang jauh di luar wilayah kerajaan. Ada *Uleebalang* yang resmi diangkat oleh sultan dengan sarakata, ada juga yang tidak resmi yang bersifat turun temurun. Mereka memiliki wilayah sendiri yang otonom, sehingga mereka kadang-kadang bersikap seperti seorang raja yang sesungguhnya.

kehidupan adat⁷. Lebih dari itu, Sultan dan para *Uleebalang* bahkan menjadi simbol keberadaan adat dalam pilar utama yang mendukung serta memperjuangkan keberadaan agama.

Gambaran keberadaan adat dan agama serta kaitan keduanya yang ditambah pula dengan pilar-pilar pendukungnya, tentu saja memberikan kesan terhadap adanya polarisasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat Aceh. Terjadinya

polarisasi secara potensial merupakan sumber konflik yang menonjol. Hal ini mungkin saja terjadi, namun kemungkinan seperti itu pada waktu tertentu dapat tercegah, atau peranan penting yang dimainkan oleh para Ulama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, baik di luar maupun di dalam kerajaan.

Penghargaan yang dinikmati oleh Kaum Ulama dalam hal ini tidak hanya berasal dari lapisan masyarakat atas saja, melainkan pula dari kalangan rakyat biasa. Kendati pun yang menjadi penguasa adalah kaum *Uleebalang*, namun kedudukan kaum Ulama tidak kalah pentingnya. Menurut Misri A. Muchsin, kedudukan Ulama dalam masyarakat Aceh begitu strategis, yaitu bukan hanya sebagai pemimpin agama, melainkan pula sebagai pemimpin politik dan pemimpin perang.⁸ Perang Belanda di Aceh telah menunjukkan bahwa Ulama berada di barisan depan dalam memobilisasi kekuatan untuk memerangi penjajahan Belanda di Aceh. Bahkan Ulama pula yang telah menanamkan ideologi perang sabil kepada masyarakat, terutama kepada angkatan perang Aceh.⁹ Kenyataan ini dapat dimaklumi, sebab dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai spiritual, maka dengan sendirinya posisi Ulama berada dekat sekali dengan masyarakat tersebut, bahkan dapat dikatakan berada di jantungnya.

⁷ Nazaruddin Syamsuddin , *Revolusi di Serambi Mekkah, Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta : UI-Press, 1999), h. 12

⁸ Misri A. Muchsin, *Tasawuf di Aceh Dalam Abad XX : Studi Pemikiran Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba (1907-1983)*, " (Disertai S3 pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 12

⁹ Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah : Perang Aceh 1973-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987) h, 151-173.

Dengan demikian dalam struktur masyarakat Aceh dikenal ada tiga kelompok elit, yaitu Sultan, Ulama, dan *Uleebalang* (*three pillars*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kokoh dalam menciptakan Aceh menjadi sebuah kawasan yang kuat dan disegani, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Bahkan mereka saling beriringan bahu dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁰ Oleh sebab itu, dasar struktur politik selain Sultan, yakni *Uleebalang* dan Ulama.

Pada masa kesultanan Aceh, antara Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial dimaksud selalu mendapat perhatian istimewa dari berbagai kalangan, terlebih lagi bagi para sejarawan yang ingin mengkajinya secara lebih akurat dan mendalam. Hal ini disebabkan karena kedua elit sosial tersebut dianggap sebagai suatu objek yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

¹⁰ Husaini Husda, "Kiprah Ulama dalam Sejarah Percaturan Politik di Aceh", *Jurnal Adabiya*, I, (1999), h.9.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENGARUH ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Pengertian Ulama

Secara etimologis “Ulama” dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “*alim*”, yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmunan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam.¹¹ Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat di percaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.¹²

Dalam Masyarakat Aceh “Ulama” memegang peranan penting baik itu dalam bidang sosial, agama, dan bahkan di beberapa tempat ulama juga berperan dalam bidang politik.¹³ Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat. Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan Ulama ini sangat dihormati dan dikeramatkan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilakabkan kepada mereka.¹⁴ Menafsirkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Doktrin-doktrin, hukum-hukum, dan mereka merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam. Dalam *ensiklopedia*

¹¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve,tt), h. 91

¹² Faisal Ismail, *Dilema Nahdlatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia,2004),h.3

¹³ Harry J. Benda, *Japanese Military administration in Indonesia*, selected document, Translation series No. 6, (New heaven: Yale University, 1965),h.73

¹⁴ Hasan Shadaly, “*A Preliminary study on the impact on a community and its culture in Indonesia*”, Unpublished M.A. thesis, (Ithaca,N.Y.:Cornell University,1955),h.155

of the orient, kata “Ulama” dalam islam berarti komunitas orang-orang yang berpendidikan atau berpengetahuan. Secara umum Ulama dapat diartikan sebagai orang-orang yang memproses atau menghasilkan Ilmu pengetahuan.¹⁵

Ulama di anggap punya kekuatan dalam berbagai belahan dunia muslim, namun pengaruh mereka dalam masyarakat seringkali tergantung terhadap kuat atau lemahnya otoritas sekuler atau penguasa. Dalam banyak hal Ulama tentu saja bekerja sama dengan para penguasa dan sering memainkan peranan tergantung kondisi, kadang kala mereka diam saja menerima politik yang dijalankan pemerintah.¹⁶

Kredibilitas Ulama sangat tergantung dan berpengaruh pada tingkat kemandirian (independen) mereka dalam berfatwa. Jika mereka terlalu banyak berhubungan dengan para penguasa, tentunya masyarakat akan menjauh dari mereka dan mencari guru agama di tempat lain. Dengan begitu kedudukan ulama sudah tidak ada artinya dalam masyarakat, sebaliknya bila mereka tidak terlalu banyak bekerja sama dengan pemerintah, maka setiap fatwa mereka akan di dengar oleh masyarakat sebagai ilmu. Pertumbuhan modern dari sebuah struktur Negara Islam yang modern, telah melemahkan posisi ulama. Kalau Ulama berada di bawah penguasa yang lemah maka akan berdampak pada stabilitas sebuah Negara. Seperti dalam masalah kehakiman, sebuah Negara modern memiliki batas dan jarak dengan aktifitas Ulama, dengan begitu ulama pada zaman modern dia lebih menjurus pada penguasa dari pada sebagai pemimpin spiritual seperti yang pernah terjadi pada masa lampau.¹⁷

Di Aceh, Ulama disebut “*Teungku*”, seseorang dapat disebut *teungku* melalui belajar di *Dayah* atau *rangrang* (Pesantren) yang jauh dari tempat kelahirannya.¹⁸ Seseorang

¹⁵ Tore Kjeilen, *ensiklopedia of the Orient*, (Lexic Orient Copy Right, 1996-2005), h. 445

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 224

¹⁸ James T. siegel, *The rope of god*, (Berkeley and Los angeles: University of California Press, 1996), h.48

tidak menjadi *teungku* dengan hanya belajar agama di tempat kelahirannya saja namun dia harus berangkat dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain untuk memperoleh ilmu dari gurunya. Bahkan kalau memungkinkan dia juga berangkat ke tanah suci makkah dalam rangka mendalami ilmunya.¹⁹

Orang Aceh menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi *teungku* hanya menimba ilmu di kampung sendiri saja. Agar dihormati dan di muliakan seperti seorang *teungku* di tempat kelahirannya, dia harus memperolehnya melalui "*meudagang*" atau "*meuranto*", yakni menjadi seorang asing (*ibnu sabil*) yang singgah dan melintasi dari satu tempat pengajian ke tempat pengajian lain dengan meninggalkan kampung halamannya.²⁰

Dengan berpindah dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain, dalam rangka menuntut ilmu agama, calon *teungku* tentu saja memperoleh berbagai macam pengalaman yang membuatnya menjadi matang dan lebih dewasa dalam berfikir dan dapat mengikat ukhuwah diantara sesama mereka, meskipun terdapat kesenjangan sosial di antara mereka. Disini lah dia akan menemukan jati dirinya sebagai seorang manusia biasa dan alamiah. Karena itu, para *teungku* berkewajiban menyerukan kepada manusia untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar tanpa memperdulikan kelas sosial. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat dihormati bahkan dikeramatkan. Bahkan di banyak tempat, masyarakat desa dan *teungku* dapat hidup berdampingan. Snouck hurgronje juga mengatakan bahwa para *teungku* di aceh telah mengambil peranan yang sangat penting dalam bidang politik, dibandingkan sebagai ahli agama atau kehidupan sufi. Hampir 30 tahun peperangan menentang penjajahan Belanda dimotori oleh para *teungku*, tidak terkecuali pada masa Jepang. Kedua peristiwa penting ini

¹⁹ James L. Peacock. *Indonesia: An Antropological perspective*, (pacific palisades, California: good year publishing company, 1973),h.24

²⁰ C. Snouck hurgronje, *The Achenes*, 2 Vols, Trans. By A.W.S.O Sullivan, (leiden:E.J, brill, 1906),h.25-26

memperlihatkan betapa peranan Ulama dalam bidang politik tidak dapat dinafikan.²¹

Apapun gelar atau panggilan yang diberikan oleh manusia kepada seorang Ulama, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya di mata Allah. Tugas mereka yang utama adalah murni sebagai *warasatul anbiyaa*, selain tugas-tugasnya sebagai manusia biasa dalam masyarakat. Jarang ada Ulama yang menyuruh seseorang memanggil dirinya ustad, *teungku* ataupun kiyai, namun gelar itu secara otomatis tersemat dan melekat padanya ketika ia memberikan atau menyampaikan syiar islam kepada umat. Gelar yang diberikan oleh umat kepadanya bukan karena uang atau karena ada hal-hal lain, akan tetapi karena ilmu dan kelebihan yang dimilikinya dalam menuntun umat kepada kebaikan di dunia dan akhirat.

B. Kedudukan Ulama sebagai anggota Masyarakat

Di sini dapat ditekan bahwa posisi dan peran Ulama itu sangatlah penting dan terfokus pada dua hal. *Pertama*, mereka dengan bobot kepakaran dan keulamaan masing-masing berposisi dan sekaligus berperan sebagai “ pencerah” alam fikiran umat. Para ulama, sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing berperan aktif dalam “mencerdaskan” kehidupan umat. Pemikiran para ulama menjadi bahan rujukan –rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus di gali untuk selalu di kembangkan secara kreatif. Fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan oleh para Ulama selalu menjadi rujukan pengetahuan, menjadi dasar bimbingan moral dan menjadi acuan hukum sehingga umat tidak terombang ambing dalam ketidak pastian, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kemasyarakatan yang selalu timbul dalam kehidupan ini sesuai dengan gerak laju modernitas²²

²¹ *ibid*,h.165

²² Faisal Ismail, *Dilema Nahdatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia,2004), h.5

Kedua, posisi sentral dan peranan strategis Ulama adalah sebagai panutan umat. Kualitas moral yang baik diperlihatkan dan di contohkan oleh para Ulama mencerminkan nilai dan peradaban suatu Bangsa. Umat Islam dan Bangsa Indonesia kini sedang mengalami gelombang transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam keadaan demikian, terjadi arus pergulatan dan pengumpulan nilai dalam berbagai aspek kehidupan sosial.²³ Dengan keteladanan moral yang baik, mulia dan luhur dari para Ulama ini, maka akan mendapatkan contoh dan bimbingan moral sehingga umat tidak akan kehilangan arah dan kendali dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yusny Saby dalam bukunya *A profile of the Ulama in Acehese Society*, menyebutkan bahwa ada tiga fungsi Ulama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai seorang manusia biasa (anggota masyarakat), sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiyaa*), dan sebagai ibu (pengayom) masyarakat.²⁴

Sebagai manusia biasa, para Ulama harus bekerja untuk menghidupi mereka sendiri, yakni mereka membutuhkan suatu kehidupan yang normal sebagaimana orang lain disekitarnya. Mereka butuh makanan untuk dimakan, butuh pakaian untuk dipakai, butuh kepada keluarga untuk tinggal, dan butuh rumah untuk berteduh. Mereka juga butuh lahan pertanian, perkebunan, televisi, radio, kendaraan dan lain-lain. Jika para Ulama tersebut jenis manusia gampang, mereka tentu saja berkeinginan untuk memperoleh materi dunia yang berlebihan, namun keinginan tersebut dapat terkontrol mengingat fungsi mereka yang lain.

Sementara Ulama sejati, dia tidak pernah menurutkan hawa nafsunya untuk memperoleh kekayaan. Kalau memang ada dia akan mengatakan *Alhamdulillah*.²⁵ Mengenai hal ini dalam masyarakat Aceh terkenal dengan ungkapan yang

²³ *Ibid*

²⁴ Yusny Saby, Islamic and Social Change. *The Role of The Ulama In Acehese Society*, (Bangi:UKM Press, 2005), h.141

²⁵ *Ibid*

menggambarkan kasih sayang Ulama pada seseorang, yaitu “*gaseh mak oh rambat, gaseh ayah oh jeurat, gaseh teungku troh akherat*” (kasih ibu sampai di tangga, sayang ayah sampai di pusara, cinta Ulama sampai alam baka).²⁶

Dalam rangka menjaga marwah dan wibawanya para Ulama sejati tentunya tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada sultan, Panglima *Sagoe, Uleebalang*, pada perusahaan ataupun pemerintah. Mereka bukan pula pengemis jabatan dan harta penguasa, walaupun ada yang memberi dan memfasilitasinya, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut secara berlebihan atau ada yang menolak sama sekali. Ini dikarenakan para Ulama Aceh dahulu adalah Ulama sufi atau Ulama tasawuf yang mengutamakan dan memiliki sifat-sifat terpuji, menjaga Ibadah serta amal perbuatan mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ujub, riya’ dan takabur.²⁷ Di samping itu, mereka sebagai *rule model* dalam masyarakat dan mereka ingin bebas dan merdeka menyuarakan kalimat Allah tanpa ada embel-embel apapun, bahkan gaji saja merupakan hal yang tabu dalam dunia Ulama.

Mengenai sumber pendapatan para Ulama biasanya mereka mendapatkannya dari hasil usaha sendiri dan dukungan para dermawan, seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf. Seperti halnya masyarakat Aceh pada umumnya, mereka biasa memulai dengan bertani, bagi Ulama yang tidak memiliki lahan sendiri, masyarakat yang kaya biasanya menyediakan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu di Aceh jarang sekali ada orang yang memberikan sumbangannya buat rumah sakit, sekolah atau kebutuhan public lainnya kecuali ada Ulama yang terlibat di dalamnya.²⁸ Kemudian kalau ada seorang *Teungku* di kampung yang ingin mengadakan acara kenduri, maka masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan

²⁶ H.M. Thamrin Z, *Perang Kemerdekaan Aceh*, (Banda Aceh : Badan Perpustakaan Daerah, 2007), h. 148

²⁷ Muhibuddin Wali, *Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf*, (Jakarta : Fa Dara, 1972), h.6

²⁸ *Ibid* , h. 143

menyumbangkan barang-barang berupa beras, kambing, daging lembu, ikan sayur-mayur, dan lain-lain.

Sebagai manusia dan sebagai *warasatul anbiyaa*, kedudukan Ulama sangat terhormat, terpuji dan memiliki beberapa peran sosial keagamaan sekaligus. *Pertama*, sebagai guru yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dan ajaran Islam.²⁹ *Kedua*, sebagai penafsir ayat Al-Qur'an untuk menjawab berbagai hal dalam masyarakat, dan sebagai hakim yang memutuskan perkara jika ada perselisihan di antara kaum muslimin, dan yang *ketiga*, sebagai mubaligh yang berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu sehingga beban penyampaian mengakui bahwa Ulama sebagai ahli waris nabi, tentu mereka akan mengikuti apa yang dianjurkan para Ulama. Bahkan karena mulianya para Ulama ini tintanya saja dianggap lebih mulia dari darah seorang yang mati syahid.³⁰ Ulama juga harus selalu tampil sederhana dalam kesehariannya, kerendahan hatinya tercermin dalam sikapnya yang qana'ah.

Sejak zaman kerajaan Pasai, Ulama mendapat tempat terhormat dalam dunia pemerintahan dan dihargai masyarakat. Sultan Malikul Saleh dan pengganti-penggantinya sangat menghormati Ulama, bahkan mereka sendiri adalah orang-orang yang alim. Pada zaman keemasan kerajaan Aceh, para Ulama juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan Sultan, teruslah bermusyawarah dengan alim Ulama, mendengar nasehat mereka, dan harus bermurah hati dengan mereka.³¹

Peran Ulama dalam fungsinya sebagai *warasatul anbiyaa*, sebagaimana namanya dalam hirarki masyarakat Aceh sebagai berikut seperti *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku di rangkang*,

²⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve), h. 447

³⁰ Muhammad Athiyah Al-Abrasjy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohat Bakry L.L.S, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 46

³¹ Hamka, *Dari Pembendaharaan Lama*, (Medan : Maju, 1963), h : 188-189

teungku meuseujid, (*imuem meuseujid*), *teungku seumubeut*.³² Artinya adalah mereka berperan sebagai pewaris nabi dalam mengajarkan ilmunya, baik itu di *dayah*, *ranggang*, *bale*, *meunasah* atau *meuseujid*. Dengan begitu melalui wadah-wadah yang ada mereka terus saja menyampaikan risalah ini dari generasi kegenerasi dengan tanpa mengenal lelah dan jerih payah.

Selanjutnya sebagai pembimbing dan sebagai “pengayom” bagi masyarakat, Ulama sering dilakapkan dengan berbagai nama. Nama-nama tersebut biasanya berasal dari bahasa Arab “*abb*” (Ayah), “*walid*” (ayah), “*Tu*” (Kakek), yang mana dalam masyarakat Aceh juga sering digunakan. Seperti panggilan “*abu*”, “*abi*”, “*abah*”, “*abon*”, “*walid*”, merupakan nama-nama yang sering dipanggil di kalangan para Ulama. Dalam hal ini seperti Teungku Haji Muhammad Daud Beureuh, dipanggil “*Abu Beureueh*”, atau kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari beliau sering disebut “*abu*” saja. Kemudian Teungku Haji Abdullah Hanafi Tanoh Mirah di panggil “*Abon*” oleh para muridnya. Panggilan-panggilan seperti kepada orang tuanya itu, mengidentifikasikan kedekatan seorang Ulama dengan masyarakatnya.

Ada juga lakab “*buya*”, yang berasal dari bahasa Arab “*abuya*” yang artinya “bapak tercinta”, namun di Aceh jarang digunakan. Ada juga seperti lakab yang dipanggil kepada Teungku Haji Muda Wali al-Khalidy di Aceh Selatan, yang dikenal dengan sebutan “*Abuya Muda Waly*”. Panggilan tersebut bisa jadi ada pengaruh dengan apa yang ada dalam tradisi Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa sekarang untuk Ulama atau orang alim sering dipanggil “*Tu*” seperti yang dipanggil Teungku Haji Muhammad Amin Mahmud Blang Blahdeh, di Kabupaten Bireun, yang lebih populer dengan sebutan “*Tu Min*”.

Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang untuk seorang yang memiliki pengetahuan di bidang agama bukan lagi disebut teungku tapi “ustad” (guru dalam bahasa Arab),

³² *Ibid*, h. 145

meskipun ada sebagian dari mereka yang masih menyebutkan *teungku* juga. Panggilan tersebut ada kaitannya pada tempat dia memberikan ilmunya yakni di madrasah ataupun di dayah. Demikian panggilan tersebut juga meluas kepada kalangan Ulama yang akhir-akhir ini mulai digunakan.³³

Ulama dalam peran dan kedudukannya dalam masyarakat tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan baik suka maupun duka seperti menghadiri setiap ada acara, apakah itu *khanduri blang* (kenduri sawah), *khanduri mauled* (kenduri maulid), *acara meukawen* (acara pesta perkawinan), perceraian, kematian, pembagian harta warisan, berkonsultasi, menyembuhkan penyakit seperti kemasukan setan dan lain-lain, Ulama tetap mempunyai peranan sentral dalam masyarakat. Dikarenakan demi fungsinya dalam bidang adat maupun agama, maka Ulama ini sangat kuat basisnya dalam masyarakat, sehingga di samping mereka dikenal sebagai *warasatul anbiyaa* namun juga sebagai *mother of society* (ibu atau pengayom masyarakat).³⁴

Di lihat dari perannya yang begitu penting ini, kebanyakan orang mengira itu mudah dan mulus saja. Kenyataannya dalam membina umat ini tidak seindah yang diperkirakan orang. Tidak semua masyarakat mau menerima Ulama begitu saja ketika Ulama datang membawa syiar Islam. Mereka juga harus memiliki taktik dan strategi dalam memasuki lingkungan barunya. Memperkenalkan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat yang mempunyai sifat dan tabiat lamanya (berjudi, minum *khamar*, berzina, mencuri, dan lain-lain) membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi para Ulama. Makanya Ulama ada yang membawa syiar itu melalui syair, ada yang melalui perkawinan, ada melalui tarian (pewayangan) seperti di Jawa, Seudati di Aceh. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan Ulama dalam menegakkan amar-makruf nahi munkar agar syariat Islam tetap tegak di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsinya

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

sebagaimana yang disebutkan di atas, mereka kerap kali menerima makian, hinaan, diusir dari tempat tinggalnya, bahkan mau dibunuh, sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW.

C. Ulama Sebagai *Qadhi* (Ketua Pengadilan Agama)

Jabatan *qadhi* dalam kerajaan Aceh telah dimulai pada masa kesultanan, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).³⁵ Seperti diketahui, sultan itulah yang membentuk kembali pemerintahan Negara berdasar agama Islam. Menurut pengertian Islam, jabatan *qadhi* memang mempunyai tempat dalam struktur organisasi pemerintahan.

Qadhi itu tidak lebih dianggap sebagai pemimpin juga, atau jika kita hendak menyebutnya ia sebagai ketua Mahkamah Agung sultan. Kehadiran *qadhi* merupakan syarat mutlak keabsahan persidangan Mahkamah Agung sultan. Bila dalam persidangan ada kasus kejahatan yang kurang berat seperti pelanggaran-pelanggaran dan perkara-perkara perdata ringan dapat diputuskan oleh *qadhi* dan para ulama saja tanpa ikut serta anggota majelis sultan lainnya. Apabila ada mengenai perkara yang besar, dalam rangka keabsahan vonis, maka sangat dituntut agar semua anggota majelis dapat menghadiri sidang supaya perkara dapat diputuskan secara kolegal.³⁶

Pada saat kerajaan Aceh didirikan, setiap sultan atau sultanah yang memimpin kerajaan pasti didampingi oleh Ulama sebagai *qadhi malik al-Adil*. Suatu kenyataan yang mungkin berbeda dari daerah lain adalah tidak hanya raja yang menempatkan Ulama sebagai *qadhi malik al-adil* untuk menasehatinya, namun lebih dari itu yakni setiap negeri (*nanggro*) dan kepala *gampong* juga dibantu oleh Ulama lokal.

Ketika Sultan Iskandar Muda memegang tampuk pimpinan, pemerintah sipil di Aceh dibagi kepada tiga teritorial. Tingkat Pertama, tingkat rendah, adalah *gampong*

³⁵ K.F.H. Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan*, alih bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), h. 49.

³⁶*Ibid*

(kampung), dipimpin oleh pemimpin *gampong*, *keuchik* sebagai pemimpin dalam urusan duniawi, sedangkan *Tgk. Imuem Meunasah* sebagai pemimpin agama. Tingkat kedua di atas *gampong*, yakni *mukim* yang terdiri dari beberapa *gampong*. *Mukim* dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan *Qadhi Mukim*. Tingkat ketiga adalah tingkat yang paling tinggi yaitu negeri (*nanggroe*) yang dipimpin oleh *Uleebalang* dan *Qadhi nanggroe*.³⁷

Pada saat kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada abad ke-18, khususnya pada masa pemerintahan para sultanah (Ratu Zakiatuddin Syah dan Ratu Keumalat Zainatuddin Syah)³⁸, kerja *qadhi* tidak semata-mata terbatas pada memimpin sidang-sidang Mahkamah Agung sultan saja, namun ia juga disertai berbagai pekerjaan lain yang lebih banyak menyerupai jabatan kepala protokol. Selanjutnya, tak seorang pun dibenarkan menghadap sultan jika tidak didampingi *qadhi* kecuali para pejabat Sultan dan *Uleebalang* seperti Teuku Maharaje Lela, Teuku Raja Na Lela, Teuku Rama Setia, Teuku Panglima Meuseugit Raya, Teuku Nek Raja Muda Seutia, Teuku Nanta Seutia Raja, Teuku Lam Gugop, Teuku Imeum Lueng Bata, dan Teuku Duratab Panglima Raja.³⁹

Sebenarnya *qadhi* dalam masyarakat Aceh dapat dilihat dalam dua perspektif : yang *pertama*, *qadhi* itu diangkat dari orang alim yang otoritasnya dalam bidang keagamaan yang *kedua*, *qadhi* juga ada yang dari pegawai kerajaan yang ditetapkan dengan kekuasaan tertentu oleh raja yang berkuasa.⁴⁰ Dengan pernyataan ini mengidentifikasi bahwa “*qadhi*” tidak memiliki posisi yang independen atau otonomi, ini merupakan suatu kenyataan bahwa di Aceh ada beberapa keputusan pengadilan yang ditangani atau diputuskan langsung oleh penguasa atau raja itu sendiri tanpa melibatkan

³⁷ A. Mukti, *An Introduction to Government of Aceh's Sultanate*, (Yogyakarta : Nida, 1970), h. 12

³⁸ T. Ibrahim Alfian dkk, *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*, (Jayakarta : Agung Offset, 1994), H. 70-71.

³⁹ Langen, *Susunan* . . . h. 49-50.

⁴⁰ Hadi, *Islam* . . . , h. 162